

**PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN
DI JAWA, 2003-2011**

Oleh :

Joko Susanto

UPN “Veteran” Yogyakarta

Email : jk.susanto.68@gmail.com

Abstrak

Sebagian besar penduduk miskin berada di pulau Jawa. Pemerintah telah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai kebijakan termasuk dengan kebijakan pertumbuhan pro kemiskinan (Pro Poor Growth). Penelitian ini menganalisis implementasi pertumbuhan pro kemiskinan di pulau Jawa. Secara lebih terperinci, penelitian ini mengidentifikasi apakah pertumbuhan ekonomi di Jawa berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin, dan faktor apa yang juga berperan dalam penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Variabel penelitian mencakup presentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat melek huruf selama periode 2003-2011. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel berdasar model Fixed Effects. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat melek huruf berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan angka melek huruf diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian yang lebih baik, dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan yang baik baik, direfleksikan oleh tingkat melek huruf, mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Kata kunci : kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, melek huruf, pro poor growth

Pendahuluan

Di samping masalah pengangguran dan ketimpangan distribusi, kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa terjadi di hampir semua belahan dunia. Pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak

dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila terjadi pertumbuhan ekonomi. Pertambahan jumlah barang dan jasa sebagai ujud nyata dari pertumbuhan ekonomi memungkinkan pemerintah untuk dapat mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Terdapat konsensus yang berlaku luas bahwa pertumbuhan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan, meskipun bukan kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*). Pada saat yang sama, pembahasan tentang kebijakan *pro-poor growth* cenderung lebih terfokus pada target-target penurunan tingkat kemiskinan. Terdapat peningkatan kesadaran untuk mewujudkan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang dinamis dengan disertai upaya mewujudkan suatu keadilan sosial.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah banyak membantu mengurangi kemiskinan di Asia Timur. Proporsi penduduk yang hidup dalam di bawah garis kemiskinan turun tajam dari sebesar 33 persen pada tahun 1990 menjadi 9,9 persen pada tahun 2004. Sementara itu, pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia Tenggara diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 41 persen menjadi 29,5 persen. Sebaliknya, di Sub-Sahara Afrika, pertumbuhan ekonomi yang lamban diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan yang lamban pula. Selama periode 1990-2004, jumlah penduduk miskin di kawasan ini hanya turun dari 47 persen menjadi 41 persen (Overseas Development Institute, 2008).

Beberapa kawasan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Akan tetapi permasalahan berikutnya adalah bagaimana negara-negara di kawasan tersebut dapat mempertahankan pertumbuhannya. Kebijakan pemerintah

berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kunci keberhasilan suatu negara dalam mempertahankan pertumbuhannya terletak pada ketepatan kebijakan pemerintah, tata kelola (*governance*) dan aturan main yang berlaku (Resnick dan Birner, 2006). Pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan iklim yang kondusif bagi peningkatan berinvestasi dan meningkatkan produktivitas pekerja maupun modal. Pemerintah dituntut untuk bisa menerapkan kebijakan dan peraturan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah harus dapat mewujudkan stabilitas makroekonomi, tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), dan iklim investasi sehingga mekanisme pasar bisa berjalan secara efisien.

Dalam Rencana Pembangunan nasional, Indonesia telah menerapkan tiga strategi pembangunan ekonomi yang merupakan *pro-growth*, *pro job*, dan *pro poor strategi*. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan membawa rumah tangga Indonesia terbebas dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat digunakan sebagai katalisator untuk mengurangi kemiskinan (Farwati, 2012). Pertumbuhan ekonomi tinggi akan diikuti dengan kenaikan pendapatan masyarakat sehingga jumlah penduduk yang hidup di bawah kemiskinan berkurang.

Di samping faktor pertumbuhan ekonomi, terdapat faktor yang juga berperan penting dalam penurunan tingkat kemiskinan di antaranya tingkat melek huruf (*lliteracy*). Kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis akan diikuti dengan kenaikan produktivitas masyarakat. Masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas dan mengerti teknologi baru (Mchombu dan Cadbury, 2006). Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut sehingga proses produksi dapat dilakukan lebih

efektif dan efisien. Barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh masyarakat meningkat sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan tingkat kemiskinan berkurang.

Selanjutnya penelitian ini mengkaji dampak implementasi *pro poor growth* di Pulau Jawa. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk miskin berada di pulau Jawa. Secara lebih terperinci, penelitian ini mengidentifikasi apakah pertumbuhan ekonomi dan tingkat melek huruf berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa.

Kajian Pustaka

Kebijakan *Pro-Poor Growth*

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi adalah penurunan tingkat kemiskinan. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dapat dicapai melalui adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan. Isu yang akhir-akhir ini berkembang menyatakan bahwa pertumbuhan bukan merupakan alat yang efektif untuk pengurangan kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Untuk itu perlu diperhatikan aspek distribusi pendapatan. Dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin, maka kebijakan pemerintah dalam hal distribusi pendapatan dan distribusi aset menjadi sangat penting. Para ekonom memandang bahwa hubungan antara pertumbuhan, ketimpangan dan kemiskinan merupakan suatu hubungan yang sangat kompleks (Kakwani *et al*, 2004).

Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir istilah *pro-poor growth* telah merambah dalam berbagai diskusi kebijakan pembangunan. Meskipun penggunaan istilah tersebut mulai meluas, akan tetapi masih sedikit konsensus tentang apa

sebenarnya arti *pro-poor growth* dan faktor penentunya (Aart Kraay, 2004). Sampai saat ini, para ekonom masih memperdebatkan konsep pertumbuhan pro kemiskinan (*pro-poor growth*).

Secara umum, suatu pertumbuhan ekonomi akan dikategorikan sebagai pertumbuhan pro-kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Isu selanjutnya menyangkut ukuran seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi pada kenaikan pendapatan masyarakat miskin sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dikategorikan sebagai pertumbuhan pro kemiskinan (Overseas Development Institute, 2008). Beberapa ekonom pendukung ukuran relatif menyatakan bahwa pertumbuhan dikategorikan sebagai *pro-poor growth* apabila pertumbuhan ekonomi tersebut mengakibatkan kenaikan pendapatan kelompok masyarakat miskin secara lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan pendapatan kelompok masyarakat kaya.

Sementara itu, sejumlah ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dikatakan pro-miskin apabila pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan perubahan distribusi pendapatan yang dengan sendirinya mengurangi kemiskinan (Kakwani dan Pernia, 2000). Akan tetapi definisi ini agak terbatas. Pertumbuhan yang sangat cepat di China dan pengurangan kemiskinan yang dilakukan selama tahun 1980 dan 1990 tidak menjadikan kelompok masyarakat miskin menerima manfaat (*benefit*) yang lebih besar daripada manfaat yang diterima kelompok masyarakat kaya. Suatu definisi kebijakan *pro-poor growth* yang lebih luas dan lebih intuitif adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dikategorikan sebagai pro-miskin jika pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil Penelitian Sebelumnya

Escobal dan Ponce (2010) menganalisis peran kelembagaan dan investasi infrastruktur dalam pertumbuhan pro-kemiskinan (*pro-poor growth*) di Peru. Faktor kelembagaan meliputi kombinasi dari empat karakteristik saling terkait yaitu a) keberadaan organisasi b) derajat ketidaksetaraan aktiva produktif c) tingkat ketidaksetaraan kesempatan, dan d) tingkat fragmentasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kelembagaan memperkuat efek infrastruktur publik pada pertumbuhan pendapatan masyarakat terutama bagi penduduk miskin sehingga kemiskinan menjadi lebih responsif terhadap pertumbuhan.

Sementara itu, Farwati (2012) menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikategorikan sebagai *pro-poor growth*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berdasar data provinsi tingkat dari 2004 sampai dengan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan bervariasi untuk berbagai jenis pengeluaran. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui pengurangan ketimpangan pendapatan.

Auckhinleck (2013) menganalisis dampak melek huruf dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendayagunakan sumur bor sebagai upaya dalam pengurangan tingkat kemiskinan di sub-Sahara, Afrika. Penelitian ini mengambil sampel sejumlah 240 orang dengan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari delapan kabupaten melalui penggunaan instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melek huruf mampu berperan aktif dalam upaya pemberdayaan sumur bor guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat melek huruf mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat melek huruf akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Metode Penelitian

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel penelitian mencakup presentase penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat melek huruf di keenam propinsi di Pulau Jawa yang meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur. Cakupan rentang waktu penelitian adalah dari tahun 2003 sampai 2011. Adapun titik akhir pada tahun 2011 dikarenakan data tahun 2011 merupakan publikasi terbaru dari BPS.

Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional dijelaskan sebagai berikut.

- a. Jumlah penduduk miskin adalah persentase jumlah penduduk pada setiap propinsi di pulau Jawa yang berada di bawah garis kemiskinan. Satuan yang dipergunakan adalah persen.
- b. Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase kenaikan produk domestik regional bruto (*PDRB*) pada setiap propinsi di seluruh pulau Jawa. Untuk variabel ini satuan yang digunakan adalah persen.
- c. Angka melek huruf adalah persentase penduduk berumur 15 ke atas di seluruh propinsi di pulau Jawa yang bisa membaca dan menulis. Satuan yang dipergunakan adalah persen.

Alat Analisis

Penelitian ini meliputi kondisi jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk melek huruf pada seluruh propinsi di pulau Jawa mulai tahun 2003 sampai dengan 2011. Dengan demikian data penelitian berbentuk data panel yang merupakan gabungan data runtun waktu dan belah silang. Data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan data runtun waktu atau belah silang (Baltagi, 2003). Beberapa keunggulan data panel antara lain adalah 1). Data panel mampu mengontrol heterogenitas individual, 2). Data panel lebih banyak memberikan informasi, variabilitas, derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan mengurangi kolinieritas antar variabel dan 3). Data panel lebih mampu untuk mengamati dinamika penyesuaian.

Model penelitian dituangkan dalam suatu persamaan regresi yang meregress jumlah penduduk miskin sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi dan angka melek huruf.

$$MISKIN_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 TUMBUH_{it} + \alpha_3 MLKHRUF_{i,t} + e_{i,t} \quad (1)$$

Tanda koefisien diharapkan $\alpha_2 < 0$; $\alpha_3 < 0$

Keterangan

MISKIN adalah jumlah penduduk miskin

TUMBUH adalah pertumbuhan ekonomi tiap propinsi di Pulau Jawa

MLKHRUF adalah jumlah penduduk melek huruf tiap propinsi di

Pulau Jawa

i adalah dimensi belah silang (propinsi)

t adalah dimensi waktu

Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil Analisis

Dalam regresi data panel terdapat 2 (dua) model dasar yaitu model *fixed effects* dan *random effects*. Pada model *fixed effects*, maka *intercept* diasumsikan spesifik untuk setiap unit belah silang. Perbedaan antar unit belah silang ditunjukkan oleh perbedaan *intercept*. Sementara itu, dalam model *random effects*, maka *intercept* terdistribusi secara random untuk setiap unit belah silang. Kesalahan dalam memilih model yang benar akan berdampak pada kesalahan interpretasi.

Untuk menguji model yang unggul apakah model *fixed effects* ataukah *random effects* dilakukan uji Hausman. Uji Hausman mengikuti kaidah distribusi *Chi-Square* (χ^2) dengan derajat kebebasan sesuai jumlah variabel independen. Apabila nilai *Chi-Square* statistik lebih kecil daripada χ^2 pada derajat keyakinan tertentu, maka model yang dipilih adalah *random effects*. Sebaliknya, bila nilai *Chi-Square* statistik lebih besar daripada χ^2 model yang pilih adalah *fixed effects*. Hasil pengujian Hausman menunjukkan nilai *Chi-Square* statistik sebesar 13,182. Sementara itu nilai *Chi-Square* tabel ($\alpha=5\%$) sebesar 5,992. Dengan demikian model yang dipilih adalah *fixed effects* (Tabel 1).

Tabel 1.
Pengujian Hausman

Chi-Square Statistik	Chi-Square Tabel (5%)	Model Dipilih
13,182	5,992	<i>Fixed Effects</i>

Hasil regresi berdasar model *fixed effects* menunjukkan nilai R^2 yang cukup tinggi sebesar 0,947. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 94,7 persen variasi variabel dependen (tingkat kemiskinan) dapat dijelaskan oleh variabel independen

(pertumbuhan ekonomi dan angka melek huruf). Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,658 dan signifikan secara statistik. Dengan demikian apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,658 persen, *ceteris paribus*. Sementara itu koefisien variabel jumlah penduduk melek huruf sebesar -1,880 dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti apabila jumlah penduduk melek huruf naik sebesar 1 persen, maka tingkat kemiskinan turun sebesar 1,880 persen, *ceteris paribus* (Tabel 2).

Tabel 2.
Hasil Estimasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan (*Fixed Effects*)

Variabel	Koefisien	t-Statistic
Konstanta	203,687	8,774 *
Pertumbuhan Ekonomi	-0,658	-5,006 *
Melek Huruf	-1,880	-7,914 *

Variabel dependen: Tingkat Kemiskinan

$R^2 = 0,947$

$F = 132,772$

*) significant pada ($\alpha=5\%$)

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan produk domestik bruto (*PDB*). Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian semakin besar. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang semakin banyak diperlukan sumber daya yang semakin banyak pula termasuk sumber daya manusia (*SDM*). Mereka yang pada awalnya menganggur atau setengah menganggur kini terlibat dalam proses produksi.

Mereka berhak atas balas jasa dari proses produksi. Dengan kata lain mereka memiliki pendapatan. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu faktor yang berperan pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak (orang yang memiliki pendapatan atau kekayaan yang tinggi). Dana hasil pajak, di samping dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, juga dipergunakan sebagai subsidi bagi kelompok masyarakat miskin. Mereka memperoleh sejumlah uang sehingga pendapatan mereka meningkat. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa semakin bertambah sehingga tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Peningkatan konsumsi akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok miskin.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Farwati (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian. Barang dan jasa tersebut didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Secara umum kepemilikan masyarakat akan barang dan jasa mengalami kenaikan sehingga mereka tidak lagi dikelompokkan dalam keluarga miskin.

Angka melek huruf berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi angka melek huruf, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Penduduk yang mampu membaca dan menulis akan memiliki wawasan yang lebih luas dan mengerti teknologi baru. Secara individual maupun kolektif, mereka akan

berupaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Penduduk yang melek huruf akan memiliki keunggulan sehingga mereka berpeluang besar untuk ikut serta dalam proses produksi. Sebaliknya penduduk buta huruf menjadikan masyarakat mengalami kesulitan dalam proses produksi. Hal ini penduduk yang melek huruf akan mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Produktivitas penduduk buta huruf lebih rendah daripada penduduk yang melek huruf. Salah satu indikator kinerja perusahaan adalah produktivitas pekerja. Perusahaan akan memilih tenaga kerja yang lebih produktif. Produktivitas pekerja berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat upah. Upah tinggi yang menjadikan pekerja sejahtera hanya dapat dipenuhi apabila ada peningkatan produktivitas yang memadai sesuai dengan harapan pengusaha. Peningkatan produktivitas pekerja menunjukkan kenaikan kontribusi pekerja dalam menghasilkan output sehingga pekerja berhak memperoleh balas jasa lebih besar dan diwujudkan dalam bentuk upah dan gaji yang lebih tinggi. Kenaikan upah dan gaji menunjukkan kenaikan pendapatan masyarakat sehingga mereka tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Auckhinleck (2013) yang menyatakan bahwa masyarakat yang melek huruf mampu berperan aktif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat yang melek huruf akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memiliki keahlian dan ketrampilan. Berbekal keahlian dan ketrampilan ini, masyarakat dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Masyarakat mendapatkan penghasilan antara lain berupa upah dan gaji sehingga mereka tidak lagi dikelompokkan dalam rumah tangga miskin.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat melek huruf berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dan angka melek huruf diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin di pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan yang baik baik, direfleksikan oleh tingkat melek huruf, mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk menghilangkan buta huruf. Apabila penduduk sudah melek huruf, maka mereka dapat mempelajari cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Hal ini berarti produktivitasnya meningkat. Peningkatan produktivitas kerja akan diikuti dengan peningkatan upah dan gaji. Dengan upah dan gaji yang lebih tinggi, maka kesejahteraan penduduk akan meningkat. Mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aart Kraay, (2004). When Is Growth Pro-Poor? Cross-Country Evidence, IMF Working Paper (<http://ideas.repec.org/p/imf/imfwpa/04-47.html>)
- Auckhinleck, Kwame Adow (2013) Role of Literacy In Sustainable Boreholes Provision – People Empowerment For Poverty Reduction, Developing country studies (4) : 1-17
(<http://www.iiste.org/Journals/index.php/DCS/article/view/5067/0>).
- Baltagi, Badi., H., 2003. *Econometric Analysis of Panel Data*, John Wiley and Sons.
- Escobal, Javier and Carmen Ponce (2010) Access to Public Infrastructure, Institutional Thickness and Pro-Poor Growth in Rural Peru, Discussion Paper Series, University of Manchester, (<http://www.ippg.org.uk/papers/dp41.pdf>).
- Farwati, Riya, (2012). Pro-Poor Growth: Does it Work in Indonesia? (A Research Paper) Erasmus University (<http://thesis.eur.nl/pub/13121/>)
- Kakwani, Nanak dan Pernia (2000) , “What Is Pro-Poor Growth?” *Asian Development Review*, Vol. 18(1) :1–16.
- Kakwani, Nanak , Shahid Khandker dan Hyun H. Son (2004), Pro-Poor Growth: Concepts And Measurement With Country Case Studies, Working Paper, United Nations Development Programme.
<Http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper1.pdf>.
- Mchombu, Kingo dan Nicola Cadbury, (2006). Libraries, Literacy and Poverty Reduction: A Key to African Developmen, Book Aid International, <http://eprints.rclis.org/10167/>
- Overseas Development Institute, (2008). Pro-poor growth and development, Linking economic growth and poverty reduction, ODI Briefing Papers
(<http://www.odi.org.uk/publications/574-pro-poor-growth-development>)
- Resnick Danielle dan Regina Birner, (2006). Does Good Governance Contribute to Pro-Poor Growth?: A Review of the Evidence from Cross-Country Studies, DSGD Discussion Paper No: 30,
(<http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/dsgdp30.pdf>)